

Judul : Buka 28 juta rekening yang diblokir, PPAK masih menjadi sorotan publik
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Buka 28 Juta Rekening Yang Diblokir, PPAK Masih Menjadi Sorotan Publik

Meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah membuka 28 juta rekening, tapi kritikan ke PPAK karena telah memblokir rekening nganggur atau dormant masih terus mengalir.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut langkah PPAK itu sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang serius.

"Menurut saya PPAK sudah melakukan pelanggaran kewenangan yang serius yang bisa digugat itu ke pengadilan. Karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum. Ukuran umum itu apa? Barang siapa rekeningnya tidak bergerak tiga bulan akan dibekukan, itu jahat. Terlalu jahat itu," ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Mahfud menegaskan pemblokiran rekening hanya bisa dilaku-

kan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jawabnya tudingan itu, Kepala PPAK Ivan Yustia Wardana mengungkap langkah pemblokiran sementara sejak beberapa bulan lalu berdampak pada tren deposit maupun transaksi judi online (judol).

Menurut Ivan, pemblokiran rekening-rekening pasif itu guna mencegah penyalahgunaan rekening untuk penyimpanan dana hasil tindak pidana. Baik itu korupsi, narkoba hingga judi online.

Berdasarkan data PPAK, pemblokiran rekening berdampak signifikan terhadap penurunan transaksi judol. Bahkan, ia menyebutkan jika tren total deposit judi daring itu menurun tajam setelah pembekuan jutaan rekening dormant.

"Ketika dormant kita bekukan, deposit judol langsung

nyungsep sampai minus 70% lebih. Dari Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun-an lebih," terang Ivan kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/8/2025).

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi memahami niat PPAK melakukan pemblokiran rekening nganggur. "Saya kira tujuan dan niatnya baik," ujar Badiul.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengkritik pemblokiran rekening. Menurut dia, tugas dan fungsi PPAK adalah untuk mengawasi bukan melakukan pemblokiran. "Rekening tidak aktif bukan berarti mencurigakan," katanya.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan Fauzi Amro dan Badiul Hadi terkait pemblokiran rekening. Berikut wawancaranya.

H. FAUZI AMRO
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

DPR Siap Panggil PPAK Untuk Minta Klarifikasi



Rekening tidak aktif bukan berarti mencurigakan. Banyak orang menyimpan uang untuk tabungan umrah, dana pendidikan, pensiun, atau investasi jangka panjang.

PPATK memblokir rekening pribadi yang tidak aktif selama tiga bulan. Apa tanggapan Anda?

Kebijakan tersebut sebagai langkah yang berlebihan dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

PPATK dibentuk untuk pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan, bukan untuk menyentuh ranah privat warga atau mengelola kebijakan teknis perbankan seperti memblokir rekening yang dianggap pasif.

PPATK beralasan pemblokiran untuk pencegahan?

Alasan pencegahan tidak pidana keuangan tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk memblokir rekening

hanya karena tak ada aktivitas selama tiga bulan.

Apa dampaknya dari kebijakan pemblokiran rekening ini?

Tindakan seperti ini berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Rekening tidak aktif bukan berarti mencurigakan. Banyak orang menyimpan uang untuk tabungan umrah, dana pendidikan, pensiun, atau investasi jangka panjang. Negara tidak boleh seanehnya membatasi akses warga terhadap uangnya sendiri.

Apa langkah yang akan diambil oleh DPR?

Komisi XI DPR RI akan segera

memanggil PPAK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.

Kami ingin memastikan tidak ada lembaga yang bertindak di luar batas konstitusional. Kalau memang ada kebutuhan menilik rekening pasif yang rawan disalahgunakan, aturan harus jelas, berbasis Undang-Undang, dan terakreditasi dengan baik.

Jangan sampai niat baik memberantas kejahatan keuangan justru menimbulkan ketakutan dan distrust publik terhadap sistem perbankan. Ini berbahaya.

Kami akan pastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat secara ekonomi maupun dalam hal privasi. ■ RUM

BADIUL HADI, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)

Niatnya Baik, Tetapi Caranya Bikin Gaduh



Kemarin, PPAK telah memblokir rekening yang telah menganggur untuk kepentingan mengantisipasi judol. Apa pendapat Anda?

Sebenarnya kebijakan pemblokiran rekening yang telah menganggur ini niat dan tujuan sangat baik, yaitu untuk mengantisipasi maraknya pemakaian rekening warga untuk kepentingan judol.

Selain buat judol, tujuan PPAK juga untuk memperbaiki data penerima bantuan yang dipakai untuk judol dan pencucian uang. Saya kira bagus untuk memperbaiki.

Belum lagi adanya praktik jual beli rekening ya?

Iya. Ada indikasi rekening dijual belikan untuk kepentingan yang tidak

bertanggungjawab dan untuk buat menampung uang judol. Dan upaya yang dilakukan oleh PPAK itu baik saja untuk mempersempit mata judol.

Dan hasilnya, PPAK menyebarkan jika judol mengalami penurunan hingga 70 persen. Berarti upaya untuk mempersempit judol berhasil.

Jika dianggap berhasil menekan judol, kenapa diprotes netizen dan masyarakat?

Kesalahannya adalah karena PPAK tidak melakukan komunikasi dengan baik ke publik sehingga menimbulkan gejolak. Idealnya PPAK itu menyampaikan terlebih dahulu ke masyarakat jika akan melakukan pemblokiran sementara rekening. Tujuannya untuk mengantisipasi

maraknya rekening yang dipakai untuk judol. Jika disampaikan terlebih dahulu, saya kira masyarakat akan mendukung upaya pemblokiran tersebut.

Apa catatan Anda dari kasus ini? Belajar dari kasus ini, pemerintah harusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Dan melakukan koordinasi antar lembaga sehingga tidak ada lagi lembaga yang dipanggil oleh presiden gara-gara kebijakan.

Lalu, apa masukan Anda dari kasus pemblokiran rekening ini? Supaya tujuan pemblokiran judol ini lebih efektif, aparat hukum harus terlibat aktif dalam menekan judol. ■ RUM